

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya

SMA Negeri 7 Banjarmasin merupakan salah satu satuan pendidikan menengah atas negeri yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini beralamat di Jalan Dharma Praja V Nomor 47, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Lokasi sekolah tersebut dapat diakses melalui peta digital pada tautan berikut: <https://h7.cl/1l6yc>. Keberadaan SMAN 7 Banjarmasin tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan menengah yang berkualitas seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah Kota Banjarmasin.

Secara historis, SMAN 7 Banjarmasin didirikan pada tanggal 16 Desember 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2275/2/1973. Pada awal pendiriannya, sekolah ini belum bernama SMA Negeri 7 Banjarmasin, melainkan SMP Negeri 28 Banjarmasin. Status tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini pada mulanya berfungsi sebagai satuan pendidikan tingkat menengah pertama sebelum mengalami perubahan seiring dengan kebijakan dan kebutuhan pendidikan di daerah.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1985, ketika berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0353/O/1985 tanggal 9 Agustus 1985, sekolah ini resmi beralih status menjadi SMA Negeri 7 Banjarmasin. Perubahan tersebut kemudian diperkuat melalui SK Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 513/115.10/I/1985 tanggal 18 Desember 1985, yang secara administratif menetapkan lembaga ini sebagai sekolah menengah atas negeri. Sejak saat itu, SMAN 7 Banjarmasin mulai berfokus pada penyelenggaraan pendidikan menengah atas dengan orientasi akademik dan pengembangan karakter peserta didik.

2. Visi dan Misi Sekolah

Visi

Menjadi Sekolah menengah atas unggulan yang menghasilkan lulusan berkarakter, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan kurikulum merdeka,
- b. Mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa,
- c. Membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab,
- d. Membangun lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif.

3. Identitas Sekolah

Identitas SMAN 7 Banjarmasin

Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Profil Sekolah

4. Data keadaan Guru, Siswa dan Karyawan di SMAN 7 Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMAN 7 Banjarmasin, diperoleh data bahwa jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut sebanyak 1.274 siswa. Sementara itu, jumlah pendidik yang aktif mengajar tercatat sebanyak 74 orang guru. Adapun tenaga kependidikan dan karyawan sekolah terdiri atas 9 orang tenaga tata usaha, 3 orang petugas satuan pengamanan (satpam), serta 2 orang tenaga laboran. Seluruh data guru, siswa, dan karyawan tersebut telah tercatat dan terintegrasi dalam sistem Dapodik sebagai basis data

resmi sekolah, yang digunakan dalam berbagai keperluan administrasi dan kebijakan Pendidikan.

Tabel 4.1 Rincian Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PTK	Jumlah
Guru	74
Tenaga Kependidikan	14
Jumlah	88

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kurikulum dan layanan pendidikan maka struktur organisasi disusun secara sistematis untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan efektif. Struktur Organisasi SMAN 7 Banjarmasin terdiri dari Kepala Sekolah, Kasubag Tata Usaha, Waka Ur. Kurikulum, Waka Ur. Kesiswaan, Waka Ur. Sarpras, Staf Bid. Pengajaran, Staf Bid. Humas, Staf Bid. Penilaian, Staf Bid. Koord Ekskul, Staf Bid. Kerumahtanggaan, Staf Bid. Pengembangan SDM & Prestasi Akademik, Staf Bid. Ketertiban & Keamanan, Staf Bid. Memeliharaaan & Kearsipan lingkungan, Koord. Bimbingan Konseling. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penulis sudah memberikan penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan akan menguraikan tentang data-data yang penulis dapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di SMAN 7 Banjarmasin. Data yang disajikan ini adalah data tentang Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru di SMAN 7 Banjarmasin. Data-data yang didapatkan penulis disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Subjek yang diteliti untuk mendapatkan data data tersebut adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Operator Dapodik, Tata usaha pemegang Dapodik dan Guru.

Pada penyajian data ini, penulis mengelompokkan sesuai dengan urutan perumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, agar memudahkan dalam penyajian data dan analisis data. Untuk mengetahui Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru di SMAN 7 Banjarmasin. Sehingga diperoleh data sebagai berikut:

1. Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru di SMAN 7 Banjarmasin.

Implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban sekolah dalam melakukan pendataan pendidikan secara nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, operator Dapodik, guru, dan tenaga kependidikan, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan Dapodik

di sekolah ini telah berjalan secara rutin dan terstruktur. Pengelolaan data siswa dan guru dilakukan melalui proses pengumpulan data dari masing-masing unit kerja, kemudian diinput oleh operator Dapodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh keterangan bahwa Dapodik dipandang sebagai sistem data utama yang menjadi dasar seluruh kebijakan pendidikan di sekolah. Bapak Arjudin, S.Pd., M.I.Kom selaku Kepala sekolah menyatakan:

Dapodik memiliki peran yang sangat penting karena seluruh data sekolah, baik data peserta didik maupun pendidik, bersumber dari sistem tersebut. Apabila data yang tercantum tidak sesuai, maka kebijakan yang diambil sekolah juga berpotensi mengalami permasalahan.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator Dapodik, diperoleh informasi bahwa implementasi Dapodik dilakukan melalui tahapan pengumpulan, penginputan, dan validasi data. Ibu Fransisca Br.sinaga,S.kom selaku Operator Dapodik menyampaikan:

Data diperoleh dari guru, wali kelas, dan tenaga tata usaha, kemudian diinput ke dalam sistem Dapodik. Setelah proses penginputan, dilakukan pengecekan ulang untuk meminimalkan kesalahan, mengingat dampaknya secara langsung berpengaruh terhadap siswa dan guru.⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan tenaga tata usaha pemegang Dapodik, diperoleh keterangan bahwa peran tata usaha lebih banyak berkaitan dengan penyediaan dokumen administrasi pendukung. Bapak Rizky oktaviadi, S. Kom selaku Tenaga tata usaha menyatakan:

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Arjudin, S.Pd., M.I.Kom, selaku Kepala sekolah, SMAN 7 Banjarmasin, 19 November 2025.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Fransisca Br.sinaga,S.kom selaku Operator Dapodik, SMAN 7 Banjarmasin, 19 November 2025.

Tenaga tata usaha membantu menyiapkan data administrasi guru dan kelembagaan sekolah, seperti surat keputusan dan dokumen pendukung lainnya, agar operator dapat menginput data secara lengkap dan akurat.⁴⁹

Hal ini menunjukkan bahwa tata usaha berperan sebagai pendukung administratif dalam implementasi Dapodik. Sementara itu, hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa guru terlibat langsung dalam penyediaan data akademik.

Bapak Rizqi Indra Maulana, S.Pd selaku Guru, menyampaikan:

Guru berperan dalam melengkapi data beban mengajar serta data peserta didik. Apabila terdapat perubahan, guru melaporkannya kepada operator agar data yang tercantum sesuai dengan kondisi sebenarnya.⁵⁰

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Dapodik dalam pengelolaan data siswa dan guru di SMAN 7 Banjarmasin telah melibatkan seluruh unsur sekolah secara terkoordinasi. Implementasi ini didukung oleh komunikasi yang baik, pembagian peran yang jelas, serta komitmen para pelaksana.

2. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru di SMAN 7 Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh keterangan bahwa dukungan pimpinan sekolah menjadi faktor utama dalam implementasi Dapodik. Bapak Arjudin, S.Pd., M.I.Kom selaku kepala sekolah menyatakan:

Pihak sekolah memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan Dapodik karena data tersebut sangat menentukan arah kebijakan sekolah.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Rizky oktaviadi, S. Kom selaku Tenaga Tata Usaha, SMAN 7 Banjarmasin, 5 Desember 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Rizqi Indra Maulana, S.Pd selaku Guru, SMAN 7 Banjarmasin, 5 Desember 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Arjudin, S.Pd., M.I.Kom, selaku Kepala sekolah, SMAN 7 Banjarmasin, 19 November 2025.

Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen pimpinan yang kuat dalam mendukung implementasi kebijakan.

Dari sisi operator Dapodik, faktor pendukung yang dirasakan adalah kompetensi dan pengalaman dalam mengelola sistem. Ibu Fransisca Br.sinaga, S.kom selaku Operator menyampaikan:

Pengalaman serta keikutsertaan dalam pembaruan informasi terkait Dapodik membuat proses pekerjaan menjadi lebih lancar.⁵²

Tenaga tata usaha menambahkan bahwa kerja sama antar bagian sekolah mempermudah proses pengelolaan data. Bapak Rizky oktaviadi, S. Kom selaku Tenaga tata usaha menyatakan:

Kerja sama antarbagian sekolah memudahkan proses pelengkapan data sesuai dengan kebutuhan sistem Dapodik.⁵³

Sementara itu, guru menyampaikan bahwa kesadaran akan pentingnya data pendidikan menjadi faktor pendukung tersendiri. Bapak Rizqi Indra Maulana, S.Pd, selaku guru menyatakan:

Guru menyadari pentingnya keakuratan data, sehingga berupaya melaporkan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.⁵⁴

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang berperan dalam implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin. Dukungan kepala sekolah menjadi faktor utama yang mendorong pelaksanaan Dapodik secara konsisten.

⁵² Wawancara dengan Ibu Fransisca Br.sinaga,S.kom selaku Operator Dapodik, SMAN 7 Banjarmasin, 19 November 2025

⁵³ Wawancara dengan Bapak Rizky oktaviadi, S. Kom selaku Tenaga Tata Usaha, SMAN 7 Banjarmasin, 5 Desember 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Rizqi Indra Maulana, S.Pd selaku Guru, SMAN 7 Banjarmasin, 5 Desember 2025.

Kepala sekolah memberikan arahan, pengawasan, serta dukungan kebijakan internal terkait pendataan.

Selain itu, kompetensi operator Dapodik dalam mengelola sistem dan memahami prosedur pendataan turut mendukung keberhasilan implementasi. Kesadaran guru dan tenaga kependidikan dalam menyediakan data yang akurat juga menjadi faktor penting yang menunjang kelancaran pengelolaan data siswa dan guru.

3. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru di SMAN 7 Banjarmasin.

Secara konseptual, kendala dalam implementasi kebijakan merupakan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh keterangan bahwa kendala utama terletak pada ketepatan dan kelengkapan data dari peserta didik dan orang tua. Bapak Arjudin, S.Pd., M.I.Kom selaku kepala sekolah menyampaikan:

Permasalahan yang sering muncul adalah adanya perubahan data siswa yang informasinya terlambat diterima oleh pihak sekolah, sehingga pembaruan data di Dapodik tidak dapat dilakukan secara langsung.⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi Dapodik tidak sepenuhnya bersumber dari internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi pihak eksternal.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Arjudin, S.Pd., M.I.Kom, selaku Kepala sekolah, SMAN 7 Banjarmasin, 19 November 2025.

Sementara itu, Ibu Fransisca Br.sinaga,S.kom selaku Operator Dapodik mengungkapkan adanya kendala teknis sistem, sebagaimana disampaikan,

Pada saat mendekati batas waktu sinkronisasi, sistem sering mengalami penurunan kinerja, sehingga proses penginputan dan sinkronisasi data menjadi terhambat.⁵⁶

Keterangan ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur sistem nasional menjadi salah satu hambatan dalam implementasi Dapodik.

Dari sisi tenaga tata usaha, kendala yang dihadapi berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan data digital. Bapak Rizky oktaviadi, S. Kom selaku Tenaga tata usaha menyampaikan:

Terdapat perbedaan antara data pada dokumen fisik dan data yang diminta dalam sistem, sehingga diperlukan pengecekan ulang secara cermat.⁵⁷

Adapun Bapak Rizqi Indra Maulana, S.Pd, selaku Guru menyampaikan kendala berupa keterbatasan waktu dan pemahaman teknis. Guru menyatakan:

Kesibukan mengajar menyebabkan pelaporan perubahan data tidak selalu dapat dilakukan secara segera.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin. Kendala utama yang dirasakan adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data. Operator Dapodik menyampaikan bahwa beban kerja meningkat pada saat sinkronisasi data dan pembaruan sistem.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Fransisca Br.sinaga,S.kom selaku Operator Dapodik, SMAN 7 Banjarmasin, 19 November 2025.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rizky oktaviadi, S. Kom selaku Tenaga Tata Usaha, SMAN 7 Banjarmasin, 5 Desember 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rizqi Indra Maulana, S.Pd, selaku Guru, SMAN 7 Banjarmasin, 5 Desember 2025.

Selain itu, kendala teknis berupa jaringan internet yang tidak selalu stabil juga memengaruhi kelancaran proses penginputan dan sinkronisasi data. Dalam kondisi tertentu, sistem Dapodik mengalami gangguan yang menyebabkan proses pendataan harus ditunda. Kendala waktu juga menjadi permasalahan, terutama ketika terdapat batas waktu penginputan data dari pihak pusat.

C. Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Dapodik dalam pengelolaan data siswa dan guru di SMAN 7 Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, operator Dapodik, tenaga tata usaha, hingga guru. Implementasi tersebut tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis penginputan data, tetapi juga sebagai proses manajerial yang menuntut adanya koordinasi, komunikasi, serta tanggung jawab bersama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi Dapodik. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan fokus penelitian, yaitu implementasi Dapodik dalam pengelolaan data siswa dan guru, kendala yang dihadapi dalam implementasi Dapodik, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin.

1. Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, penginputan, validasi, serta pemutakhiran data secara berkala. Kepala sekolah menyatakan bahwa Dapodik menjadi sistem utama yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sekolah, khususnya terkait data siswa dan guru. Wakil kepala sekolah menyampaikan bahwa koordinasi pengelolaan data Dapodik dilakukan melalui wali kelas dan guru, terutama dalam pengumpulan dan kelengkapan data siswa sebelum diserahkan kepada operator. Sementara itu, operator Dapodik menjelaskan bahwa penginputan data harus sesuai dengan kondisi real di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam sistem. Guru dan tenaga tata usaha berperan sebagai penyedia serta pengonfirmasi data pendukung.

Secara analisis, temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Dapodik tidak hanya bersifat teknis, tetapi melibatkan koordinasi antar unsur sekolah. Implementasi Dapodik tersebut juga sejalan dengan visi dan misi sekolah, karena pengelolaan data yang akurat dan tertib mendukung pengambilan keputusan pendidikan serta mencerminkan budaya kerja yang disiplin dan profesional di lingkungan sekolah.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, kondisi ini mencerminkan adanya pengaruh aspek komunikasi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi terlihat dari adanya penyampaian arahan dan koordinasi antar pelaksana, sedangkan struktur birokrasi tampak dari pembagian peran yang jelas antara kepala sekolah, wakil kepala

sekolah, operator, dan guru. Namun demikian, komunikasi yang terjadi masih bersifat situasional, yaitu lebih aktif pada saat dibutuhkan, bukan komunikasi rutin yang terstruktur.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor pelaksana dan kejelasan peran masing-masing.⁵⁹ Pembagian tugas antara kepala sekolah, operator, tata usaha, dan guru di SMAN 7 Banjarmasin menunjukkan adanya struktur kerja yang jelas, sehingga proses pengelolaan data dapat berjalan secara sistematis.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dapodik lebih intensif dilakukan pada waktu-waktu tertentu, terutama saat mendekati jadwal sinkronisasi data. Peneliti menemukan bahwa operator menjadi pusat utama dalam pengolahan data, sedangkan guru dan tenaga tata usaha hanya terlibat pada saat pelengkapan data. Hal ini memperkuat hasil wawancara bahwa implementasi Dapodik belum berjalan secara merata, tetapi cenderung bersifat periodik.

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan pola bahwa seluruh informan memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya Dapodik dalam pengelolaan data sekolah. Namun, terdapat perbedaan pengalaman dalam pelaksanaan, di mana operator merasakan beban kerja yang lebih besar dibandingkan guru dan tenaga administrasi. Pola ini menunjukkan

⁵⁹ Sumarno dkk., "An Evaluation of the Implementation of the new SMA Student Admissions Zoning System in Medan City Using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation Process Model," *IQSR Journal of Humanities and Social Science* Vol.29, No. 8 (2024): 52-60.

adanya ketergantungan sistem terhadap satu aktor utama, yaitu operator, sehingga efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu tersebut.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Noviani (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Dapodik sangat dipengaruhi oleh supervisi kepala sekolah dan kolaborasi antar stakeholder.⁶⁰ Persamaan penelitian ini terletak pada peran penting pimpinan sekolah dalam memastikan kelengkapan dan validitas data. Namun, penelitian ini menunjukkan perbedaan, yaitu pada tingkat SMA, kompleksitas data siswa dan guru lebih tinggi sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dibandingkan jenjang pendidikan dasar.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Mardiana (2021) yang menyebutkan bahwa efektivitas Dapodik sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan manajerial.⁶¹ Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat dari peran operator yang menjadi kunci dalam pengelolaan data serta dukungan kepala sekolah dalam mengoordinasikan seluruh pihak.

Secara makna, implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin tidak hanya merupakan kegiatan teknis penginputan data, tetapi merupakan sistem kerja kolaboratif yang memerlukan koordinasi yang konsisten dan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan serta penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Dapodik ditentukan oleh komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, penguatan koordinasi yang lebih

⁶⁰ Rina Noviani, "Pengaruh Pelatihan dan Supervisi terhadap keberhasilan implementasi Dapodik," *Jurnal Pendidikan dan Teknologi* Vol. 6, No. 1 (2022): 45.

⁶¹ Lusi Mardiana, "Efektivitas sistem Dapodik dalam Manajemen Sekolah," *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol 5, No. 2 (2021): 113.

terstruktur dan peningkatan keterlibatan seluruh aktor menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pendidikan.

2. Faktor Pendukung Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin meliputi dukungan kepala sekolah, koordinasi antar unit kerja, kompetensi operator, serta kerja sama guru dan tenaga tata usaha. Kepala sekolah menyatakan bahwa seluruh pihak harus terlibat agar data yang dihasilkan benar dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah. Wakil kepala sekolah menyampaikan bahwa pengelolaan data Dapodik sudah memiliki pembagian tugas yang jelas, di mana operator bertanggung jawab pada penginputan data, sedangkan guru dan wali kelas membantu menyediakan serta memverifikasi data siswa. Operator juga mengungkapkan bahwa dukungan dari pimpinan dan kerja sama dengan guru sangat membantu dalam mempercepat proses penginputan dan pemutakhiran data. Guru dan tenaga administrasi menegaskan bahwa mereka berusaha melengkapi data sesuai arahan agar tidak menghambat pekerjaan operator.

Secara analisis, temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung utama terletak pada sinergi antara kepemimpinan dan sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, kondisi ini mencerminkan terpenuhinya aspek sumber daya dan disposisi (sikap pelaksana). Dukungan kepala sekolah menunjukkan adanya komitmen pimpinan, sedangkan keterlibatan guru dan tenaga administrasi mencerminkan sikap positif pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hal ini menjadi indikator bahwa implementasi dapat

berjalan efektif apabila didukung oleh kesiapan SDM dan kemauan untuk bekerja sama.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pengelolaan data dilakukan dengan alur kerja yang cukup terstruktur, di mana operator menjadi pusat pengolahan data, sementara guru dan tenaga tata usaha mendukung melalui penyediaan dan verifikasi data. Peneliti juga melihat adanya komunikasi yang cukup baik antar pihak, terutama ketika terdapat kebutuhan pemutakhiran data. Hal ini memperkuat hasil wawancara bahwa kerja sama antar pelaksana menjadi salah satu faktor utama kelancaran implementasi Dapodik.

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan pola bahwa keberhasilan implementasi Dapodik sangat dipengaruhi oleh kerja sama dan koordinasi yang konsisten antar warga sekolah. Semua informan sepakat bahwa tanpa dukungan kepala sekolah dan kompetensi operator, proses pengelolaan data tidak akan berjalan optimal. Pola ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada interaksi antar pelaksana.

Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian Azhari (2023) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa Dapodik akan berjalan efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan pengelolaan yang konsisten.⁶² Persamaannya terletak pada pentingnya peran pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa selain

⁶² Azhari, "Peran Strategis Dapodik Dalam Perencanaan Pendidikan," *EduTech Journal* Vol. 7, No. 3 (2023): 91.

kepemimpinan, faktor kompetensi operator dan kerja sama antar guru juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga kualitas data.

Berdasarkan Secara makna, faktor pendukung implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh budaya kerja kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur sekolah. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, serta dukungan pimpinan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan konsistensi koordinasi menjadi hal yang penting untuk mempertahankan kualitas pengelolaan data secara berkelanjutan.

3. Kendala Implementasi Dapodik dalam Pengelolaan Data Siswa dan Guru

Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin meliputi keterlambatan penyampaian data dari siswa dan orang tua, keterbatasan waktu guru dalam melengkapi data, serta kendala teknis sistem terutama saat menjelang batas waktu sinkronisasi. Wakil kepala sekolah menyampaikan bahwa kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan data dari siswa atau orang tua, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih lama dan perlu dilakukan pengecekan ulang. Operator Dapodik menyatakan bahwa sering terjadi keterlambatan data dari siswa atau guru, sehingga proses penginputan menjadi terhambat. Guru juga mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu mengajar membuat pengumpulan data kadang tidak bisa dilakukan secara cepat.

Selain itu, tenaga tata usaha menyebutkan bahwa perbedaan antara dokumen fisik dan data digital sering memerlukan pengecekan ulang.

Secara analisis, temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan faktor sumber daya dan komunikasi. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan pada aspek sumber daya dan komunikasi. Keterbatasan waktu guru menunjukkan belum optimalnya sumber daya manusia, sedangkan keterlambatan penyampaian data menunjukkan bahwa alur komunikasi antar pelaksana belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses penginputan data cenderung menumpuk pada waktu tertentu, terutama menjelang jadwal sinkronisasi. Peneliti menemukan bahwa operator harus bekerja lebih intensif dalam waktu singkat untuk menyelesaikan input data yang tertunda. Selain itu, terlihat adanya proses verifikasi berulang antara data fisik dan data digital, yang menunjukkan bahwa akurasi data masih memerlukan perhatian lebih. Temuan ini memperkuat hasil wawancara bahwa kendala implementasi tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari proses kerja di lapangan.

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan pola bahwa kendala utama implementasi Dapodik bersumber dari keterlambatan pengumpulan data dan keterbatasan koordinasi antar pihak. Semua informan mengakui bahwa operator menjadi pihak yang paling terdampak karena harus melakukan pengecekan ulang dan memastikan validitas data sebelum proses sinkronisasi. Pola ini menunjukkan bahwa implementasi Dapodik masih

bergantung pada kedisiplinan dan partisipasi seluruh pelaksana, bukan hanya pada sistem yang digunakan.

Selain itu, jika dikaitkan dengan teori implementasi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, kendala tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal, seperti keterlibatan siswa dan orang tua dalam penyediaan data.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh dukungan dari pihak luar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhan (2022) yang menyatakan bahwa kendala utama dalam implementasi Dapodik meliputi masalah teknis dan perubahan sistem yang sering terjadi.⁶⁴ Persamaannya terletak pada adanya hambatan teknis dalam penggunaan sistem. Namun, penelitian ini menunjukkan perbedaan, yaitu kendala tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari faktor koordinasi dan keterlibatan aktor pelaksana di lingkungan sekolah.

Secara makna, kendala implementasi Dapodik di SMAN 7 Banjarmasin menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, efektivitas komunikasi, serta partisipasi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berupa peningkatan koordinasi, penguatan disiplin pengumpulan data, serta pemanfaatan waktu secara lebih efektif agar proses pengelolaan data dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

⁶³ Hartawan dan Kosasih, "Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model," *IJHESS* Vol. 2, No. 4 (2023): 13-15.

⁶⁴ F. Ramadhan, "Kendala teknis dalam Implementasi Dapodik di MAN," *Jurnal Teknologi dan Pendidikan Islam* Vol. 4 (2022): 64.